

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang berhasil dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban dari tujuan penelitian adalah :

1. Kondisi Provinsi Sumatera Utara pada awal kemerdekaan yaitu masyarakat tidak mengetahui dengan pasti kebenaran proklamasi karena radio-radio yang dijadikan sebagai penyiar berita disegel oleh Jepang. Kemudian setelah Mr. Teuku Mohammad Hasan berhasil mengumumkan Proklamasi, baru mulai terbentuk laskar-laskar pejuang yang belum berkonsolidasi dengan baik. Namun respon yang berbeda juga ditunjukkan oleh pihak kesultanan yang ada di Aceh dan Sumatera Timur. Kemudian kekacauan pada masa awal kemerdekaan di Sumatera Utara juga disebabkan oleh pihak tentara Belanda yang selalu membuat provokasi sebagai salah satu usahanya untuk kembali menguasai Sumatera Utara. Sehingga ibukota propinsi terpaksa dipindahkan dari Medan ke Pematang Siantar dan kemudian ke Kutaradja.
2. Pada masa awal kemerdekaan berdasarkan keputusan PPKI pulau Sumatera dijadikan sebagai satu propinsi dengan Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur. Baru kemudian pada bulan April 1946 DPS melakukan sidang pertamanya dan menghasilkan keputusan yaitu membagi Propinsi Sumatera menjadi tiga wilayah administratif yaitu sub propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Tetapi baru kemudian pada tanggal

14 April 1947 dilakukan pelantikan Gubernur Muda untuk sub Propinsi Sumatera Utara yaitu Mr. S.M. Amin. Baru kemudian setelah keluarnya UU No 10 Tahun 1948 maka status sub propinsi Sumatera Utara dinaikan menjadi Propinsi Sumatera Utara yaitu tertanggal 15 April 1948, dimana Propinsi Sumatera Utara ini terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

3. Mr. S.M. Amin yang ditunjuk sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara kemudian pada tahun 1948 diangkat menjadi Gubernur Propinsi Sumatera Utara memiliki banyak peran dalam usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui Propinsi Sumatera Utara. Mulai dari respon-respon dan solusi yang diberikan mengenai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya mencakup seluruh Propinsi Sumatera Utara. Kebijakan Mr. S.M. Amin antara lain menyelesaikan pemberontakan-pemberontakan di dalam masyarakat, melantik anggota DPRDSU dan memaparkan pokok-pokok pikirannya sebagai program kerja, memperbaiki bidang perekonomian dengan mengeluarkan URIPSU dan kebijakan dibidang ekonomi lainnya. Selain itu berusaha keras dalam mempertahankan eksistensi pemerintahan sipil Propinsi Sumatera Utara pada masa Republik Indonesia mengalami masa kegentingan.

B. Saran

Melihat berbagai permasalahan yang telah banyak di paparkan tersebut, penulis memberikan saran yaitu :

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia penulis menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan seluruh jasa-jasa Mr. S.M. Amin tersebut yang begitu besarnya pada masa awal pemerintahan Republik dan berjasa besar karena terus mengupayakan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui Propinsi Sumatera Utara dengan segala upaya dan kebijakannya sehingga Propinsi Sumatera Utara tetap eksis sebagai sebuah symbol dari Republik Indonesia.
2. Bagi pembaca penulis menyarankan agar tokoh-tokoh pahlawan yang sangat berperan besar pada penegakan kedaulatan republik ini jangan lah dilupakan. Mungkin dahulu sebelum tulisan ini di buat, ketika orang bertanya “Siapakah Mr. S.M. Amin?”, jawaban yang ditemukan adalah orang-orang tidak mengenal sosoknya. Maka setelah ada tulisan ini dan kemudian dibaca, maka penulis berharap agar pembaca sekiranya memahami dan terus mengingat segala peran-peran Mr. S.M. Amin yang kemudian dijadikan pegangan sebagai penyemangan dan pengkokoh karakter generasi bangsa.